

Kampanye Anti-Vaksin oleh Seorang Dokter, Apakah Melanggar Etik?

Julitasari Sundoro^{1,2}, Ali Sulaiman¹, Agus Purwadianto^{1,3}, Broto Wasisto^{1,4}

¹Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

²The Indonesian Technical Advisory Group on Immunization Communicable Disease Control (ITAGI CDC)

³Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

⁴Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (Ikkesindo)

Kata Kunci

Anti-vaksin, kampanye

Korespondensi

contact@ilmiah.id

Publikasi

© 2018 JEKI/ilmiah.id

DOI

10.26880/jeki.v2i1.8

Tanggal masuk: 11 Februari 2018

Tanggal ditelaah: 10 Maret 2018

Tanggal diterima: 11 Maret 2018

Tanggal publikasi: 19 Maret 2018

Abstrak Sejarah terjadinya wabah cacar telah melahirkan era baru dalam upaya pencegahan penyakit infeksi. Pada abad ke-19 mulai diperkenalkan terminologi vaksin dan vaksinasi. Lambat laun, vaksinasi kian populer karena mampu mengeradikasi penyakit cacar dan mampu mengontrol penyakit infeksi lainnya. Namun, perkembangan vaksin tidak serta merta mendapat tanggapan positif. Di tengah masyarakat lahir gerakan antivaksinasi yang vokal menyuarakan bahaya dari vaksinasi. Dokter sebagai garda terdepan di bidang kesehatan sekaligus penanggung jawab pasien memegang peran penting untuk mencerdaskan dan tidak terlibat dalam pusaran propaganda antivaksinasi.

Abstract The history of smallpox outbreaks had spawned new era in preventing infectious diseases. In the 19th century, the terms vaccine and vaccination were introduced. Steadily, vaccination became increasingly popular due to its ability to eradicate smallpox and control other infectious diseases. However, the development of vaccines does not always get positive responses. In the midst of society, vocal antivaccination movement was born, voicing dangers of vaccination. Doctors as front-liners in the field of health as well as responsibility bearers of patients play important role to educate patients while avoid involvement with antivaccination propaganda.

PENDAHULUAN

Vaksin secara biologi merupakan suatu bibit penyakit (virus) yang dilemahkan untuk kemudian menghasilkan kekebalan aktif saat dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Vaksin dengan segala kemampuannya untuk mencegah morbiditas dan mortalitas terhadap penyakit infeksi merupakan pencapaian terbesar di bidang kesehatan masyarakat.¹ Vaksin memainkan peran penting pada abad ke-20 karena berhasil mengeradikasi penyakit cacar (*smallpox*) pada tahun 1974 dan polio pada tahun 2014.²

Perkembangan vaksin tidak serta merta mulus begitu saja. Di saat vaksin semakin populer, maka lahir komunitas dan pemahaman yang menolaknya, yaitu kaum antivaksin. Di internet, gerakan antivaksinasi/imunisasi dalam bentuk apapun cukup

mendapat banyak perhatian.³ Banyak peneliti menilai bahwa gerakan baru ini muncul saat vaksinasi cacar mulai diperkenalkan dan terus berlanjut hingga saat ini.³ Metode penyebaran informasinya sudah berubah sejak abad ke-19, namun isu-isu yang disebarkan oleh komunitas antivaksinasi masih mirip hingga sekarang.³ Bila ditelusuri, jumlah situs internet yang membahas antivaksinasi akan jauh lebih banyak daripada situs yang mempromosikan vaksinasi. Kebanyakan kontennya pun mirip, disalin-ulang dari satu situs ke situs lainnya.⁴ Artikel-artikel itu ditulis seakan-akan memang berdasarkan bukti (*evidence based medicine*) karena menampilkan nama-nama pakar dengan data dan angka yang sangat meyakinkan.⁴

Seiring berjalannya waktu, gerakan antivaksin tidak hanya ramai di internet, tapi hingga diadakannya seminar-seminar di

perguruan tinggi. Bahkan pembicaranya adalah dokter.⁴ Dokter sebagai seorang 'ahli' dihargai atas keilmuannya, baik dari sisi teori maupun keterampilannya sebagai klinisi, sehingga informasi apapun yang disampaikan oleh seorang dokter akan lebih mudah diyakini oleh seorang pasien. Termasuk hal ini dalam kaitannya dengan propaganda antivaksin.

Salah satu tokoh yang terkenal karena sikapnya menolak vaksinasi adalah Sherri Tenpenny, dokter osteopati dari Ohio, Amerika Serikat.⁵ Beberapa terbitan bukunya yang berhubungan dengan antivaksinasi antara lain: (1) *Saying No to Vaccines*, berisi penjelasan mengapa vaksin merugikan kesehatan, termasuk komplikasi vaksin seperti asma, autisme, ADHD, dan gangguan imunitas; dan (2) *FOWL! Bird Flu: It's Not What You Think*, yang memaparkan bagaimana flu burung berkorelasi dengan vaksinasi.⁵

Di dalam negeri, berbagai pendapat terkait vaksinasi banyak disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama dokter-dokter. Suara-suara tersebut pun terbelah dengan argumentasinya masing-masing.

Salah satu *cuitan* yang cukup mengundang perhatian masyarakat datang dari dr. Susilorini, M.Si.Med, SpPA. Dalam salah satu *platform* media sosialnya, Susilorini aktif menyuarakan pendapatnya terkait vaksinasi. Berikut adalah kutipan dari *cuitan* Susilorini:⁶

"Kita harus paham dulu prinsip aktivasi sel B. Ketika sel B teraktivasi dia akan berdiferensiasi menjadi Sel B memori dan sel B efektor. Sel B efektor ini akan memproduksi antibodi, antibodi bersifat biodegradable karena dia akan dikatabolisme. Dan sel B efektor juga akhirnya akan dimatikan secara terprogram. Untuk jangka waktu dia dapat bertahan adalah dalam hitungan minggu. Bila dalam jangka bulan si A terinfeksi secara alamiah sebenarnya karena tubuh sudah punya sel memori kita tidak butuh disuntik lagi. Karena memang maksud vaksinasi adalah seperti itu. Kalo diulang disuntik berkali-kali justru bisa timbul toleransi."

Kubu antivaksinasi Susilorini kemudian didukung oleh dr. Henny Zainal melalui *cuitannya*:⁷

"Sebagai seorang dokter, saya memahami dengan baik bahwa jika kuman yang disuntikkan dalam tubuh seseorang dengan daya tahan tubuh yang menurun maka kuman/virus tersebut menjadi aktif bahkan menginfeksi tubuh yang menerima vaksin tersebut. Dalam hal ini, siapakah yang berjalan membawa bahan penyakit dan memiliki resiko memberikan penularan kepada anak lainnya yang sehat?"

Yang cukup disayangkan, masyarakat awam ternyata banyak yang terpengaruh gerakan anti-vaksinasi. Kesalahan logika pikir dari tiga contoh tersebut kemudian membuat dokter-dokter mulai khawatir dan memberikan klarifikasi melalui cara yang sama, cara yang dekat dengan masyarakat, media sosial.

Dalam akun media sosialnya, dr. Piprim Basariah, SpA(K) menyuarakan, *"Vaksinasi tidak bisa digantikan dengan cara lain seperti herbal, madu, tahnik, bekam, habbats, ASI, dan lain-lain karena vaksinasi meniru kekebalan alami yang ditimbulkan oleh suatu penyakit ganas seperti difteri. Melalui vaksinasi, manusia bisa langsung memperoleh kekebalan spesifik terhadap penyakit ganas tanpa harus mengalami sakit. Hal tersebut muncul sebagai buah dari fungsi akal manusia dalam menghadapi penyakit ganas di alam ini."*⁸

Ahli Vaksin dr. Dirga Rambe Sakti, M.Sc VPCD juga memberikan pernyataannya terkait masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi sehingga opini publik menjadi rentan digoyahkan. Gaya hidup masyarakat zaman sekarang yang kurang memperhatikan higienitas dan/atau intensitas migrasi negara yang meningkat membuat masyarakat lebih rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, vaksinasi pada orang dewasa menjadi hal yang perlu untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi.⁹

Pernyataan dr. Dirga kemudian didukung oleh dr. Apin Arifiyanto, SpA, *"Tugas saya sebagai dokter adalah mengupayakan bayi tidak mengalami infeksi berulang untuk mencegah perburukan prognosis pasien dengan upaya perlindungan berupa vaksinasi."*¹⁰

Dokter lainnya yang turut aktif meluruskan kesalahpahaman masyarakat akibat gerakan antivaksinasi adalah dr. Siti Aisyah Ismail. Melalui tulisannya di laman Dinas Kesehatan

Daerah Kota Depok, Aisyah mengupas isu vaksin terbuat dari bahan dasar yang haram adalah mitos dengan menggunakan berbagai tinjauan sudut pandang termasuk fatwa ulama.¹¹

Dokter kini menghadapi kondisi yang dilematis. Vaksin secara medis telah terbukti ampuh dan belum pernah tercatat menimbulkan dampak negatif bagi pemakainya. Namun, jika salah memahami, dokter bisa saja terseret arus paham antivaksinasi dan justru menjadi pelopor gerakan ini di masyarakat. Dampaknya adalah kegagalan program pemerintah untuk mengeradikasi penyakit-penyakit infeksi yang seharusnya dapat dicegah dengan vaksin, seperti wabah difteri yang terjadi di akhir 2017. Lebih jauh lagi, beban terhadap anggaran BPJS Kesehatan menjadi bertambah dan pemerintah harus ekstra kerja keras mengatasi wabah yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Bisa dibayangkan bahwa gerakan antivaksinasi saja sudah cukup merepotkan banyak pihak, apalagi jika gerakan ini melibatkan tenaga kesehatan. Sudah selayaknya dokter mengutamakan kedokteran berbasis bukti sebelum meyakini sebuah informasi medis baru yang bertentangan dengan pemahaman keilmuan umumnya.

Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan dibatasi pada hal-hal yang menjelaskan potensi keterlibatan dokter dalam bagian propaganda antivaksinasi. Diskusi ini juga tidak akan membahas sejarah gerakan antivaksinasi dan pro-kontra argumen yang hadir di masyarakat terkait program vaksinasi mandiri maupun yang menjadi bagian dari program pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Argumen yang Digunakan Oleh Gerakan Antivaksinasi Terbukti Palsu

Aktris Amerika yaitu Jenny McCarthy cukup dikenal banyak orang sebagai sosok ibu gerakan antivaksinasi. Sikapnya konsisten terutama terhadap vaksin campak, gondok, dan MMR. Ia meyakini bahwa vaksinlah yang menyebabkan autisme pada Evan, anaknya.¹² Keyakinan ini muncul akibat penelitian Dr. Andrew Wakefield yang dipublikasikan *The Lancet*, jurnal medis Inggris, pada 28 Februari

1998.^{12,13} Belakangan, pada 6 Februari 2010 penelitian tersebut ditolak dan ditarik setelah adanya laporan falsifikasi data yang dilakukan oleh Wakefield. Jurnalis investigatif *London's Sunday Times*, yaitu Brian Deer, mengungkap bahwa Wakefield dibayar oleh seorang pengacara dengan nominal lebih dari £400.000 (\$665.000) untuk membuktikan jika vaksin tidak aman.¹²

Ditariknya artikel jurnal tersebut menyebabkan semua argumen yang mengacu pada literatur ini menjadi tertolak. Sehingga apabila terdapat dokter yang masih meyakini kebenaran dari hasil penelitian ini, maka sama saja dengan mengabaikan kaidah penelitian yang benar dan dapat diterima.

Tinjauan Etik

Dokter terikat oleh lafal sumpah dokter, di mana salah satu poinnya berbunyi bahwa dokter senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.¹⁴ Artinya bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter haruslah dilandaskan pada tujuan tercapainya kesehatan bagi masyarakat.

Pernyataan ini diperkuat oleh pasal 12 pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Holistik. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan seluruh aspek pelayanan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif) baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat.¹⁴

Melalui penjelasannya, pasal ini mencakup aspek preventif di mana seorang dokter harus memberikan pelayanan, pendidikan kesehatan, dan perlindungan pencegahan dalam rangka menghindarkan klien dan keluarganya dari risiko penyakit. Pernyataan ini menyiratkan keberpihakan pada kegiatan vaksinasi sebagai upaya preventif untuk tetap mempertahankan kesehatan di masyarakat. Segala bentuk penentangan terhadap pasal ini, maka dokter akan berurusan dengan MKEK dan bisa saja berujung dengan dicabutnya izin untuk berpraktik.¹⁵

Menolak Vaksin Melanggar Hukum

Menurut Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU Kesehatan beserta turunannya menjamin hak anak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan.¹⁶ Regulasi ini mengisyaratkan dilakukannya vaksinasi sebagai upaya mencegah penyakit. Lebih dalam lagi, pada pasal 131 Bab VII UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertera bahwa pemeliharaan kesehatan anak sudah harus dimulai sejak dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai usia 18 tahun.¹⁷ UU no 4 tahun 1984 pasal 14 tentang Wabah juga menyebutkan bahwa upaya menghalangi penanggulangan wabah dapat diancam pidana. Vaksinasi juga diatur dalam Permenkes 12/2017 yang menyebutkan bahwa imunisasi program adalah wajib dan merupakan hak anak. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Internet dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyebaran berita bohong dapat diadakan untuk diproses secara hukum.¹⁸ Dokter hendaknya dapat menggunakan media sosial dengan bijak untuk menyebarkan informasi yang berbasiskan bukti medis.¹⁹

Hal ini jelas menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia dimulai sejak anak-anak, dalam hal ini dilakukan melalui kegiatan vaksinasi. Artinya, dokter yang mempropagandakan paham antivaksinasi sama saja menghambat upaya penciptaan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi rakyat Indonesia, sehingga dokter tersebut dapat dijerat oleh undang-undang tersebut.

Penalti bagi Pelanggar Hukum

Dokter yang menjalankan propaganda antivaksin dapat dijerat dengan berbagai pasal secara hukum. Selain itu, dokter yang bersangkutan juga dapat diberi sanksi berupa pembekuan surat izin praktek dan surat tanda registrasi sebagai seorang dokter oleh IDI.

KESIMPULAN

Munculnya fenomena dokter antivaksinasi di Indonesia perlu diwaspadai karena kasusnya sudah pernah terjadi di luar negeri. Setiap dokter perlu kiranya memperbarui pengetahuannya tentang vaksinasi agar tidak mudah tertipu oleh pernyataan pihak-pihak yang menggencarkan gerakan antivaksinasi. Dokter seyogyanya membekali diri dengan prinsip keilmuan dan konsep kedokteran berbasis bukti. Selain itu, setiap dokter telah disumpah dan mengetahui adanya kode etik yang mengatur wewenang dan tanggung jawab profesinya sebagai seorang tenaga medis. Hal ini didukung dengan adanya regulasi yang mengatur hak-hak anak, dalam hal ini sebagai subyek vaksinasi sehingga segala penentangan terhadap upaya ini dapat disebut sebagai perlawanan terhadap hukum. Oleh karena itu, dokter jelas tidak boleh terlibat dalam propaganda antivaksinasi. Apabila terdapat dokter yang terbukti berperan di dalam gerakan tersebut, maka harus siap-siap berhadapan dengan dua pihak, yaitu MKEK sebagai representasi dari organisasi keprofesian dan Kepolisian sebagai representasi dari lembaga negara penegak hukum.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

1. Poland GA, Jacobson RM. Understanding those who do not understand: A brief review of the anti-vaccine movement. *Vaccine*. 2001 Mar;19(17-19):2440-5. doi: 10.1016/S0264-410X(00)00469-2.
2. Maglione MA, Das L, Raaen L, Smith A, Chari R, Newberry S, et al. Safety of vaccines used for routine immunization of U.S. children: a systematic review. *Pediatrics*. 2014 Aug;134(2):325-37. doi: 10.23970/AHRQEPERTA215.
3. Wolfe RM, Sharp LK. Anti-vaccinationists past and present. *BMJ*. 2002 Aug;325(7361):430-2. doi: 10.1136/bmj.325.7361.430.

4. Kristyanto RY. Fakta di balik kampanye hitam anti vaksin [internet]. 2012 Jun 20 [disitasi 2018 Mar 7]; Diunduh dari: <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1946498/fakta-di-balik-kampanye-hitam-anti-vaksin>
5. detikNews. Inilah Sherri Tenpenny, dokter “anti vaksin” yang kunjungannya ditolak di Australia [internet]. 2015 Jan 8 [disitasi pada 2018 Mar 7]; Diunduh dari: <https://news.detik.com/australiaplus/2797418/inilah-sherri-tenpenny-dokter-anti-vaksin-yang-kunjungannya-ditolak-di-australia>
6. Susilorini. Vaksinasi [internet]. Jan 2018 [diakses 2018 Mar 7]. Diunduh dari: <http://bundajalancahaya.blogspot.co.id/2018/01/vaksinasi-by-dr-susilorini-sp-pa.html>
7. Zainal H. Jawaban terhadap uraian vaksinasi pertama kali oleh dokter muslim [internet]. Oktober 2011 [diakses 2018 Mar 7]. Diunduh dari: <https://drhennyzainal.wordpress.com/2011/10/17/jawaban-terhadap-uraian-vaksinasi-pertama-kali-oleh-dokter-muslim/>
8. Yanuarso PB. Vaksinasi tak bisa digantikan dengan cara yang... [internet]. 2018 Jan 5 [diakses 2018 Mar 7]. Diunduh dari: <https://www.facebook.com/dokterPiprim/posts/10215255012265074>
9. Haryoko F. Siaran pers - dr. Dirga Rambe, vaksinolog termuda dunia peduli imunisasi dewasa [internet]. 2013 Juli 18 [diakses 2018 Mar 7]. Diunduh dari: http://www.ui.ac.id/download/siaran_pers/dr.Dirga_Rambe,Vaksinolog_Termuda_dunia_Peduli_Imunisasi_Dewasa_.pdf
10. Arifianto A. Apakah vaksin efektif dalam mencegah penyakit? Bagaimana membuktikannya? [internet]. 2018 Feb 15 [diakses 2018 Mar 7]. Diunduh dari: <http://arifianto.blogspot.co.id/2018/02/apakah-vaksin-efektif-dalam-mencegah.html>
11. Drachma. dr. Aisyah: Mitos vaksin mengandung babi [internet]. Dinas Kesehatan Kota Depok. Feb 2016 [diakses 2018 Mar 7]. Diunduh dari: <http://dinkes.depok.go.id/?p=1720>
12. Mitschang T. The anti-vaccine movement: Where are we now? 2014 [diakses 2018 Mar 7]; Diunduh dari: http://www.bstquarterly.com/Assets/downloads/BSTQ/Articles/BSTQ_2014-07_AR_The-Anti-Vaccine-Movement-Where-Are-We-Now.pdf
13. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. *Lancet*. 1998 Feb 28;351(9103):637-41. doi: 10.1016/S0140-6736(97)11096-0.
14. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Tahun 2012. Jakarta; 2012.
15. Ikatan Dokter Indonesia. Pedoman organisasi dan tata laksana kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Jakarta; 2008.
16. Manafe D. Awas, menolak imunisasi bisa dipidana - BeritaSatu.com. [Internet]. 2016 Nov 29 [diakses 2018 Mar 7]; Diunduh dari: <http://www.beritasatu.com/kesehatan/401828-awas-menolak-imunisasi-bisa-dipidana.html>
17. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2009.
18. Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
19. Prawiroharjo P, Librianty N. Tinjauan etika penggunaan media sosial oleh dokter. *J Etik Ked Ind*. 2017 Oct 11;1(1):31. doi: 10.26880/jeki.v1i1.7.